

POLICY BRIEF

Posisi Indonesia sebagai Presidency G20 dalam Health Working Group Meeting yang Kedua

Ringkasan Eksekutif

Dalam Presidency Indonesia di G20, Indonesia mengakui bahwa Pandemi Covid 19 sudah memberikan pelajaran penting bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi, dan perlu diperbaiki untuk menghadapi pandemic dimasa mendatang. Permasalahan pertama adalah pembiayaan yang tidak selalu tersedia, sehingga negara dengan ekonomi lemah tidak mampu membiayai penanggulangan pandemic secara utuh. Kedua adalah sulitnya berbagai negara akses terhadap obat, vaksin, alat lab maupun APD pada saat pandemic karena diembargo beberapa negara produsen untuk melengkapi kebutuhan mereka sendiri. Terakhir adalah belum ada surveillance untuk genomic data. Untuk itu diusulkan diperlukan adanya dana global yang diperlukan bila terjadi pandemic dimasa mendatang. Inovasi yang diharapkan jangan duplikasi dengan Joint Finance -Health Task Force (FHTF) tetapi melengkapi. Kedua adalah meningkatkan kemampuan untuk memobilisasi dengan cepat Vaksin, Obat, Reagen dan APD secara global, sehingga baik negara miskin juga mempunyai akses yang sama. Ketiga adalah menyepakati adanya suatu platform yang dapat meningkatkan surveillance genomik yang terpercaya dapat dimanfaatkan oleh semua anggota G20.

Semua rekomendasi akan diadvokasikan kepada seluruh anggota G20 yang hadir dalam Working Group G20 kedua di Lombok. Dengan harapan dapat menjadi masukan hasil di KTT G 20 Bali, dan merupakan hasil dari Presidency Indonesia G20. Tema Working Group G20 Kedua adalah Building Global Health System Resilience

Pendahuluan

Health Working Group G20 adalah forum dimana secara teknis dibahas usulan yang akan dijadikan bahan untuk disepakati pada tahap berikutnya yaitu Deputies meeting dan Ministerial Meeting sebelum masuk sebagai agenda di KTT G20. Bila isu dan aktivitas yang diusulkan dapat diterima oleh semua negara, jalan untuk menjadi hasil kesepakatan di tingkat KTT tidak sulit lagi.

Pada Health Working Group G 20 kedua yang akan diadakan pada Lombok NTB bulan Juni temanya adalah “Building Global Health System Resilience”. COVID-19 telah memberikan tekanan besar pada sistem kesehatan nasional dan berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian semua orang di seluruh dunia. Salah satu pelajaran terpenting yang diajarkan oleh COVID-19 adalah bahwa: arsitektur kesehatan global saat ini lambat untuk menanggapi pandemi saat ini dan tidak siap untuk mencegah keadaan darurat kesehatan masyarakat di masa depan. Dirasakan sekali pada saat pandemic, semua negara berkerja secara sendiri untuk melindungi rakyatnya. Bagi negara yang kaya, mampu perlindungan yang diberikan baik pelayanan kesehatan, bantuan finansial dan juga kebutuhan hidup dasar secara utuh. Misalnya saja, ada negara yang sebagai produsen vaksin atau obat, melakukan blokade pengiriman

vaksin obat dan reagen, hingga kebutuhan dalam negerinya terpenuhinya. Padahal pihak produsen sudah menyiapkan logistic untuk kebutuhan global.

Memang, respons yang terfragmentasi dan ketidaksetaraan sumber daya dalam melaksanakan Prevention, Preparedness and Response (PPR) di antara negara-negara menghambat mitigasi COVID-19, seperti yang dilaporkan oleh The Global Preparedness Monitoring Board dan komite peninjau implementasi Peraturan Kesehatan Internasional (IHR). Respons kolektif kita hari ini akan menentukan lintasan pandemi saat ini dan masa depan. Saat kita menghadapi ancaman yang membayangi dari penyakit menular yang muncul dan muncul kembali, memperkuat arsitektur kesehatan global adalah hal yang sangat penting. Sektor kesehatan belum memiliki mekanisme global yang dapat dengan cepat memobilisasi sumber daya, baik dalam hal pendanaan, penanggulangan medis penting, dan data ketika menanggapi krisis kesehatan masyarakat. Kumpulan sumber daya seperti itu juga dapat digunakan untuk PPR pandemi. Selain itu, ada perbedaan mencolok dalam kapasitas negara dan wilayah untuk mendeteksi dan memantau patogen yang muncul dengan pengawasan genomik dan kapasitas dalam mempersiapkan respons yang efektif. Teknologi saat ini telah menunjukkan peran penting data genomik dalam respons pandemi untuk mengatasi masalah utama, seperti sistem peringatan dini dan pengembangan diagnostik dan vaksin.

Dalam Presidency Indonesia di G20, mengusulkan untuk membangun Arsitektur Kesehatan Global baru, untuk lebih meningkatkan ketahanan global bila ada pandemi lagi. Belum lagi kalau bagi negara yang secara ekonomi lemah, kesempatan untuk mendapatkan obat atau reagen akan sangat sulit dibandingkan dengan negara yang kaya. Kita sangat merasakan bagaimana kebutuhan APD pada awal Pandemi yang begitu “dipermainkan” Arsitektur Kesehatan Global ini, pada prinsipnya tidak akan mengurangi ketahanan suatu negara, tetapi akan lebih menguatkan setiap negara, karena kebersamaan upaya dari anggota G20 dan mungkin secara global akan lebih memperkuat ketahanan suatu negara, sesuai dengan tag line G20 Presidency Indonesia yaitu *Recover Together Recover Stronger*.

Policy brief ini berupaya posisi Indonesia sebagai presidency G20 berperan dalam menggerakkan para pimpinan negara G20, harus berkolaborasi dalam menciptakan arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif dan responsif, didukung oleh mekanisme global dalam mengumpulkan sumber daya, pembiayaan berkelanjutan, distribusi yang adil untuk penanggulangan medis, dan peningkatan kapasitas untuk kemampuan pengawasan global. Ini dapat membantu negara-negara, terutama negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs) dalam menanggapi ancaman kesehatan di masa depan dan memiliki sistem kesehatan nasional yang secara luas lebih tangguh dan berkelanjutan

Oleh karena itu, *policy brief* yang disusun oleh Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana mencapai Kesepakatan antara negara hasil dari HWG G20 kedua dapat mencapai tujuannya yang diarahkan oleh Indonesia sebagai presidency G20.

Deskripsi Masalah:

Konsep, kebijakan, dan Metodologi

Ada tiga masalah besar yang perlu mendapat perhatian dalam mengatasi pandemic, kini dan dimasa mendatang, yaitu :

1. Tersedianya dana untuk dapat melakukan penanggulangan Pandemi dengan baik
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Essensial agar dapat melakukan penanggulangan pandemi dengan baik.
3. Adanya surveillance global yang dapat memberikan peringatan dini, sehingga dapat diantisipasi dengan baik oleh negara.

1. Penyediaan Dana

Kita telah belajar dari pandemi covid-19 bahwa pembiayaan untuk PPR pandemi harus memadai, berkelanjutan, dan lebih terkoordinasi serta membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan antara pimpinan di sektor kesehatan dan keuangan. Kolaborasi kedua sektor sangat penting untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan potensial, memobilisasi berbagai sumber pembiayaan yang ada dan mengeksplorasi mekanisme pembiayaan baru yang dapat dimobilisasi dengan cepat dalam menanggapi keadaan darurat kesehatan di masa depan. Dengan inisiatif berkelanjutan dari Joint Finance-Health Task Force (FHTF), sektor kesehatan akan melengkapi informasi dan berusaha untuk mengeksplorasi berbagai opsi dalam kolaborasi kesehatan dan keuangan yang dapat memperkuat upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi keadaan darurat kesehatan di masa depan dengan potensi lintas batas dalam kerangka IHR (2005). Kelompok kerja kesehatan kedua dapat berkontribusi untuk mengidentifikasi sektor apa, termasuk kriteria dan prioritas yang harus dibiayai oleh mekanisme pembiayaan baru. Dengan demikian, kita perlu mempertimbangkan rekomendasi wacana ini, seperti laporan High-Level Independent Panel (HLIP), Panel Independen untuk laporan PPR, dan Komite Peninjau IHR

Perlu mengeksplorasi cara menutup empat kesenjangan global utama yang diidentifikasi dalam laporan HLIP (misalnya pengawasan global, penanggulangan medis penting dan pasokan alat, dan tata kelola global), dan mengidentifikasi prioritas pembiayaan kesehatan global yang segera dan mendesak (misalnya ACT-Accelerator) dan prioritas pembiayaan kesehatan global jangka menengah dan panjang (misalnya One Health, kesiapsiagaan pandemi, resistensi antimikroba/tindakan penahanan AMR). Kelompok kerja tidak akan menduplikasi pekerjaan FHTF tetapi memperkuat hasil kerja yang dibahas dalam gugus tugas dan memastikan bahwa identifikasi opsi untuk koordinasi kesehatan dan keuangan optimal dan mencerminkan partisipasi yang setara dari sisi kesehatan dan keuangan. Ini akan berusaha untuk memastikan penilaian inisiatif pembiayaan yang ada dan analisis kesenjangan untuk PPR pandemi diarahkan pada pembiayaan kesehatan yang berisiko dan bahwa prioritas jangka panjang dipertimbangkan dengan baik. Kelompok kerja juga akan memastikan bahwa anggota FHTF memantau target Vaksinasi, Tes, Pengobatan, dan APD, dan menerjemahkan pelajaran menjadi rekomendasi yang akan meningkatkan kebijakan di masa depan mengenai masalah tersebut.

2. Pelayanan Kesehatan Essensial

Terjadinya pengembangan dan pemanfaatan Vaksin, Obat, Alat Diagnostik (VTD), dan Alat Pelindung Diri (APD) dengan cepat telah secara mendasar mengubah tata kelola perang melawan pandemi. Namun, upaya ini harus selalu berupaya untuk melindungi yang rentan,

mengurangi risiko varian baru, dan mencapai pemulihan ekonomi serta masyarakat secara utuh, akan tetap menjadi tantangan di negara berkembang karena adanya kekuatan pasar, kepentingan geopolitik, dan keputusan perdagangan nasional mengakibatkan ketidaksetaraan terhadap akses untuk berbagai alat kesehatan untuk penanggulangan COVID-19. Sehingga tentunya, untuk memecahkan ketidaksetaraan dalam akses ke tindakan pencegahan memerlukan pendekatan yang terkoordinasi secara global dan berkelanjutan. Pada awal pandemi, WHO dan mitra meluncurkan kemitraan ACT-Accelerator (ACT-A) untuk mendukung adanya suatu upaya global yang cepat, terkoordinasi, dan efektif untuk mengakhiri fase akut pandemi. Menyatukan pemerintah, ilmuwan, bisnis, masyarakat sipil, filantropis, dan organisasi kesehatan global, ACT-A mempercepat pengembangan, produksi, dan akses yang adil terhadap alat COVID-19 melalui empat pilar, yang terdiri dari pilar diagnostik, pilar terapeutik, pilar vaksin, yang dikenal luas sebagai COVAX, dan pilar sistem kesehatan. Meningkatkan dari inisiatif ACT-A, kita membutuhkan inisiatif yang lebih permanen sebagai platform kesiapsiagaan dan respons pandemi di masa depan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan medis yang penting. Karena pengaturan tata kelola ACT-A dibangun dengan cepat dan telah berkembang sebagai tanggapan terhadap medan yang berubah dengan cepat, kelompok kerja ini akan berfungsi sebagai platform di mana anggota G20 akan mencari cara untuk mendukung inisiatif dan mitranya untuk memastikan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih besar. Kelompok kerja ini juga akan memastikan anggota G20 memanfaatkan inisiatif untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan di masa depan

3. Surveillance Global

Selama masa pandemi, berbagi data genomik tepat waktu menjadi sangat penting, tidak hanya untuk keperluan surveillance global dan kesehatan masyarakat, tetapi juga pembuatan vaksin dan kit diagnostik. Namun, transparansi dalam mekanisme berbagi data telah menjadi suatu tantangan tersendiri. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi dan penyalahgunaan data, diperlukan sistem yang memungkinkan pelacakan data dan pengakuan terhadap mereka yang telah mengirimkan data ke suatu platform, serta tentunya pembagian manfaat (Benefit Sharing) untuk data yang telah digunakan untuk tujuan komersial. Pada tahun 2008, di tengah wabah H5N1 Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI), Indonesia mengusulkan pentingnya pembagian manfaat dan transparansi yang kemudian diadopsi dalam Kerangka Kerja Kesiapsiagaan Pandemi Influenza (PIP) dan Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS). Namun untuk tujuan yang berbeda pada saat ini, telah berdiri banyak platform yang berbagi data genomik dan telah dimanfaatkan secara luas. Dari jumlah itu, platform berbagi data genomik yang menerapkan perjanjian transfer material standar (SMTA), seperti GISAID, adalah platform yang mendapatkan kepercayaan dari negara-negara dan ilmuwan di seluruh dunia. Meskipun menggunakan database domain publik yang memungkinkan siapa saja dapat mengakses dan memanfaatkan data secara anonim, di sisi lain, juga menggunakan yang dapat diakses publik, walaupun yang dapat akses masih terbatas pada orang yang sudah diverifikasi saja, sehingga sistem ini mampu melacak dan mengenali kepemilikan data dari laboratorium asal. Oleh karena itu, menggunakan platform berbagi data genetik universal untuk mendukung pertukaran informasi yang cepat dan juga mengakui kesetaraan bagi semua negara yang berpartisipasi akan sangat berarti bagi semua negara anggota negara G20. Bahkan setelah satu dekade pandemi Influenza terakhir H1N1pdm09,

kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal kapasitas laboratorium sangat besar. Disadari bahwa infrastruktur laboratorium, teknologi yang digunakan, dan kapasitas sumber daya manusia belum merata antar negara. Sistem Biohub, inisiatif besar dari WHO, menawarkan mekanisme yang andal dan transparan bagi Negara-negara Anggota WHO untuk berbagi bahan biologis baru melalui fasilitas BioHub WHO, di bawah ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, termasuk keamanan hayati, biosekuriti, dan penyusunan regulasi. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat penerimaan, *sequencing*, analisis, penyimpanan, dan persiapan bahan biologis yang aman yang akan dikirimkan ke laboratorium lain untuk penilaian risiko dan memperkuat kesiapsiagaan global terhadap patogen. Meskipun WHO BioHub System masih dalam tahap pengembangan, anggota G20 dapat berkontribusi pada pengembangan sistem, untuk memastikan bahwa transfer pengetahuan antara negara maju dan negara berkembang termasuk dalam sistem ini yang akan membangun ketahanan kesehatan global dan memperkuat arsitektur kesehatan global.

Rekomendasi Kebijakan

Indonesia sebagai Presidency G20, perlu memiliki posisi dan saran yang menjadi keinginan anggota G20, sehingga dalam presidency ada hasil (*deliveries*), yang dapat bermanfaat bagi Indonesia dan seluruh anggota G20, dan tentunya dunia, untuk itu kiranya perlu ada kesepakatan dalam pertemuan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dana untuk penanggulangan pandemi perlu disiapkan secara global. Dana ini digunakan untuk kegiatan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Tanggap oleh negara yang membutuhkan. Diperlukan Kerjasama antara sektor kesehatan dan keuangan, sehingga pemanfaatan dana akan tepat guna dan tepat sasaran.
- 2) Pelayanan kesehatan essential untuk penanggulangan pandemi, perlu didukung sistem pembiayaan yang baik. sehingga terjamin tersedianya logistik untuk Vaksin, Obat, Alat Diagnostik (VTD), dan Alat Pelindung Diri (APD). Harus ada pengawasan yang akurat untuk menjamin tersediaan kebutuhan esensial tersebut.
- 3) Karena penting *surveillance* global dengan menggunakan Genomic Data Sharing yang aman dan terpercaya, maka anggota G20 perlu sepakat untuk menggunakan sistem sudah ada, dengan tambahan ketentuan untuk transparansi, sehingga pengguna juga dapat Pemerintahan, sehingga kepentingan nasionalnya dapat lebih luas dan penanggulangan lebih tepat guna.

Diplomasi posisi Indonesia diadvokasikan sejak pertemuan sehingga setiap negara sudah dapat merasakan urgensi dan pentingnya posisi ini. Libatkan para ahli dan peneliti yang sudah biasa menggunakan sistem ini, sehingga jelas manfaat yang dipilih, Diharapkan kesepakatan di antara Working Group G20 kedua sehingga dapat masuk bagian dari *leaders declaration* pada KTT G20 di Bali.

Kesimpulan

Pandemi Covid -19 mengajarkan kepada kita, bahwa penanganan pandemic, ternyata arsitektur kesehatan global yang ada saat ini lambat dan tidak siap untuk mencegah keadaan darurat kesehatan masyarakat. Telah terbukti terdapat tiga masalah besar yaitu diperlukan suatu pendanaan global yang siap mengatasi penanggulangan pandemic dengan baik, kedua adalah perlu disepakati bahwa dana ini digunakan untuk penanggulangan pandemic dimasa

mendatang. Ketiga adalah terbentuknya suatu sistem global Surveillance Genomik yang mampu membagi data genomic secara cepat, transparan, akurat dan dan bermanfaat bagi pengirimnya bila datanya dijadikan komersial.

Daftar Pustaka

Nikita Rosa, "Apa Itu G20? Ini Sejarah, Negara Anggota, serta Manfaat Bagi Indonesia"

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6404978/apa-itu-g20-ini-sejarah-negara-anggota-serta-manfaat-bagi-indonesia>.

Barclays.2020. "social distancing started last week, but Hospital Load Already Near Peak." Data Science High Frequency Indicator Update. Special report, March 16

Argaux MacDonald, Roberto Piazza, Galen Sher, "A Simple Guide to Estimating the Impact of Covid-19 on Travel and Hospitality Activity. IMF Research, September 2020.impact i